

**KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI ERA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

TESIS

OLEH

**RIZKI AMARA TAUFANI
NPM. 101801090**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI ERA OTONOMI
DAERAH DI KECAMATAN MANYAK PAYED
KABUPATEN ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH**

TESIS

OLEH

**RIZKI AMARA TAUFANI
NPM. 101801090**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Kinerja Pemerintahan Kecamatan di Era Otonomi Daerah di
Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang provinsi
Aceh**

Nama : Rizki Amara Taufani

NPM : 101801090

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. Kariono, MA.

Dr. Warjio, MA.

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**

Direktur

Dr. Warjio, MA.

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 12 Mei 2012

Nama : Rizki Amara Taufani

NPM : 101801090



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA.

Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Drs. Kariono, MA.

Pembimbing II : Dr. Warjio, MA.

Penguji Tamu : Drs. Done Ali Usman, M.AP.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizki Amara Taufani

NPM : 1010801090

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“Kinerja Pemerintahan Kecamatan di Era Otonomi Daerah di Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang provinsi Aceh”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinil dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Oktober 2012

Yang menyatakan,



Rizki Amara Taufani

RINGKASAN

Sebelum adanya otonomi daerah, Kecamatan sebagai wilayah administratif dari Kabupaten, dan bertindak sebagai promotor pembangunan dan mendominasi Desa. Setelah adanya otonomi daerah, Kecamatan diposisikan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten, dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di wilayah kerjanya, serta tidak lagi mendominasi Desa. Sehubungan dengan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah kinerja Pemerintahan Kecamatan di era Otonomi Daerah di Kecamatan Manyak payed Kabupaten Aceh Tamiang.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat, hubungan antar fenomena yang berhubungan dengan kinerja Pemerintahan Kecamatan Manyak Payed di era Otonomi Daerah.

Sasaran penelitiannya ini adalah Camat, Sekretaris Camat, Kabag, Kasi, Staf, Kepala Desa, BPD, masyarakat di wilayah Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang. Pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, dan khusus untuk masyarakat menggunakan aksidental atau siapa saja yang kebetulan bertemu dengan peneliti dan cocok sebagai informan.

Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Untuk menjamin validitas data digunakan teknik triangulasi yaitu memeriksa keabsahan data dengan cara membandingkan atau mencocokkan antar data yang didapat di lapangan. Kemudian untuk metode analisa data menggunakan metode analisis kualitatif model mengalir.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan setelah adanya otonomi daerah adalah sebagai berikut: *pertama* adanya kewenangan pengurusan perijinan yang sebelumnya ditangani Kabupaten; *kedua*, dalam membiayai anggaran rutin dan pembangunan Kecamatan Manyak Payed masih juga menggantungkan dari APBD; *ketiga*, kesiapan SDM Kecamatan Bulu masih perlu terus diupayakan seiring kemajuan jaman, sehingga pegawai mampu memanfaatkan teknologi komputer untuk mendukung pelayanan; *keempat*, adanya peningkatan peran Pemerintah Kecamatan Bulu, dari wilayah administratif kini telah berubah menjadi Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja dan bertindak sebagai fasilitator pembangunan di daerahnya; *kelima*, program pembangunan yang direncanakan oleh Kecamatan Manyak Payed lebih berbobot dan sesuai kebutuhan masyarakat karena dibuat atas beberapa pertimbangan, saran dan masukan dari Dinas, Instansi, Kepala Desa dan BPD (bottom-up planning); *keenam*, adanya peningkatan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan terutama yang menyangkut birokrasi pengurusan perijinan yang dilimpahkan oleh Kabupaten Aceh Tamiang kepada Kecamatan Manyak Payed; *ketujuh*, adanya prinsip transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena dalam memecahkan masalah dan pembuatan kebijakan, Kecamatan berusaha melibatkan Kepala Desa, BPD, Dinas/Instansi.

Kata kunci : Kinerja, Otonomi Daerah, Pemerintahan Kecamatan

KATA PENGANTAR

Sebagai insan yang bertaqwa kepada Allah Subhanahu wata'ala, kiranya tidak berlebihan apabila peneliti memanjatkan puji syukur atas segala rahmat dan ridlo-Nya sehingga dapat tersusun tesis ini dengan judul “KINERJA PEMERINTAHAN KECAMATAN DI ERA OTONOMI DAERAH DI KECAMATAN MANYAK PAYED KABUPATEN ACEH TAMIANG PROPINSI ACEH “ yang merupakan salah satu persyaratan menyelesaikan pendidikan Strata-2 Studi Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Berbagai keterbatasan kemampuan dan kesulitan dalam penulisan tesis ini menimbulkan kelemahan dan kekurangan. Berkaitan dengan itu dengan segala kerendahan hati peneliti berharap kritik dan saran yang membangun dari semua pihak guna peningkatan dan penyempurnaan tesis ini.

Sementara itu peneliti merasa berhutang budi kepada banyak pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam proses penyusunan laporan penelitian ini, oleh karena itu perkenankanlah penulis ucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuawardani MS. Selaku Direktur Universitas Medan Area beserta seluruh Civitas Akademika Universitas Medan Area
2. Bapak Drs. Kariono MA selaku dosen pembimbing I yang banyak memberikan sumbangan pemikiran kepada penulis
3. Bapak Warjio MA, Ph.D Selaku Ketua Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus selaku Pembimbing II yang telah banyak

membantu memberikan sumbangan pemikitan dan motivasi yang begitu besar dalam penyelesaian tesis ini

4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk dapat menimba ilmu di Universitas Medan Area
5. Bapak Ahmad Yani, S.STP M.Si selaku Camat Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang yang telah berkenan membantu penulis dalam penyempurnaan tesis ini.
6. Edysyah Mulia S.IP yang tanpa lelah selalu memberi Motivasi, dorongan dan bantuan yang tidak ternilai harganya.
7. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam penyempurnaan tesis ini namun tidak memungkinkan peneliti menyebut nama mereka satu per satu.

Akhirnya peneliti hanya dapat berharap semoga dengan terselesaikannya tesis ini akan merangsang lahirnya gagasan-gagasan baru yang berguna dan bermanfaat untuk pembenahan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Dan dengan iringan do'a semoga Allah Subhanahu wata'ala melindungi kita semua. Amin ya robbal 'alamin.

Medan, Mei 2012

Penulis

Rizki Amara Taufani

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	iii
SUMMARY	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Permasalahan	3
1.2.1 Pembatasan Masalah	3
1.2.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian.....	4
1.3.1 Maksud Penelitian	4
1.3.2 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis.....	5
1.5 Kerangka Pemikiran.....	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Kinerja	7
2.2. Pemerintah Kecamatan	15
2.3. Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	18
BAB III. METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis penelitian	22
3.2. Fokus penelitian	23
3.3. Lokasi Penelitian dan Obyek Penelitian	24
3.4. Sasaran Penelitian	24
3.5. Teknik Pengambilan sample	25
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.7. Validitas Data	28
3.8. Analisisa Data	30

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

4.1 Kabupaten Aceh tamiang.....	33
4.1.1 Keadaan Geografis.....	33
4.1.2 Keadaan Demografi.....	35
4.1.2.1 Keadaan Sosial Ekonomi.....	38
4.1.2.2 Keadaan Pendidikan.....	38
4.1.2.3 Keadaan Agama.....	40
4.1.2.4 Keadaan Kesehatan.....	42
4.2 Kecamatan Manyak payed.....	43
4.2.1 Latar Belakang.....	43
4.2.2 Luas Wilayah.....	43
4.2.3 Demografi.....	44
4.2.4 Pembagian Wilayah.....	44
4.2.5 Pemerintah.....	45
4.2.5.1 Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan	45
4.2.5.2 Struktur Organisasi	46

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil dan Pembahasan Penelitian.....	49
5.1.1 Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati Kepada Camat.....	49
5.1.2 Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan.....	52
5.1.3 Prosedur Pelaksanaan Program Atau Fungsi Pemerintahan...	53
5.1.4 Kesiapan Sumber Daya Manusia.....	54
5.1.5 Tingkat Pengetahuan Aparat Tentang PATEN.....	55
5.1.6 Upaya Terhadap Pencapaian Tujuan PATEN.....	56
5.1.7 Manfaat PATEN.....	57
5.1.8 Keadilan dalam Pemberian Pelayanan.....	58
5.1.9 Kepuasan masyarakat terhadap Pelayanan.....	59
5.1.10 Tingkat Pencapaian PAD.....	60
5.1.11 Tingkat Keberhasilan Program PATEN dengan hasil PAD	62
5.1.12 Tingkat respon masyarakat.....	63

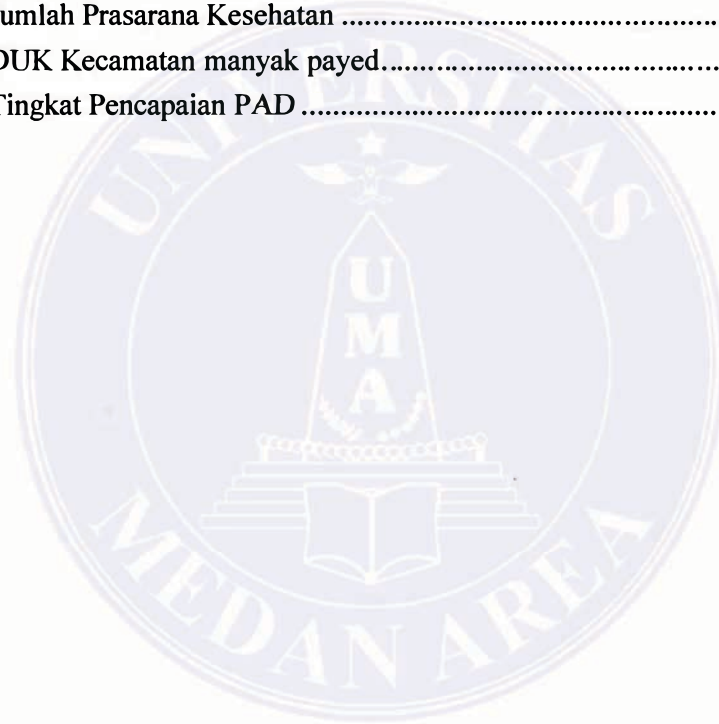
BAB VI. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	65
5.2 Saran.....	66

DAFTAR PUSTAKA.....	67
----------------------------	-----------

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Matrik Pengambilan Responden sebagai Informan	26
Tabel 4.1 Jumlah Kecamatan, Mukim dan Kampung di Kab. Aceh Tamiang	35
Tabel 4.2 Luas Wilayah	36
Tabel 4.3 Jumlah Penduduk	37
Tabel 4.4 Jumlah Sekolah, Murid dan Pengajar.....	40
Tabel 4.5 Jumlah Rumah Ibadah	41
Tabel 4.6 Jumlah Pemeluk Agama.....	41
Tabel 4.7 Jumlah Prasarana Kesehatan	42
Tabel 4.8 DUK Kecamatan banyak payed.....	48
Tabel 5.1 Tingkat Pencapaian PAD	62



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pasal 18B Amandemen II Undang-Undang Dasar 1945 Menetapkan negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh atau lazim disebut Undang- Undang otonomi Daerah (OTDA). Sebagaimana diketahui bahwa proses penyusunan Undang- Undang Pemerintahan Aceh telah berlangsung 1 (satu) Tahun kurang 14 (empat belas) hari terhitung sejak ditanda tangani UUPA dengan penandatanganan Mou Nota Kesepahaman antara RI dan GAM di Helsinki Finlandia tanggal 15 Agustus 2005.

Pada saat ini reformasi dan globalisasi telah membawa cakrawala baru dalam system politik dan pemerintah yang selama ini cenderung statis. Karena itu perubahan yang terjadi saat ini dipandang sebagai suatu langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia baru dengan dasar efesiensi, efektifitas dan demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam upaya merespon pembangunan yang terjadi, pemerintahan dituntut untuk melakukan pembenahan yang konsisten pada dirinya, terutama kesungguhan untuk menjadi pemerintah yang bersih dan berwibawa

yang pada gilirannya diharapkan mampu mengembalikan kredibilitasnya dimata masyarakat.

Berbagai kenyataan dalam pembangunan nasional selama beberapa decade terakhir ini menunjukkan telah terjadinya penyimpangan yang dilakukan aparatur birokrasi. Salah satu dampaknya antara lain kualitas pelayanan masyarakat belum dapat diwujudkan secara optimal. Aparatur birokrasi pemerintah baik di kabupaten, kecamatan maupun Kampung menunjukkan kecenderungan kurang mengutamakan pelayanan yang diharapkan oleh masyarakat.

Pelayanan sebagai salah satu fungsi utama pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan akhir-akhir ini sering dibicarakan oleh masyarakat. Masyarakat yang kritis akan mengdiskreditkan pemerintah sebagai aparatur yang tidak mampu dalam menangani masalah, apabila masyarakat menemukan kekurangan-kekurangan dalam memberikan pelayanan. Masyarakat menginginkan pelayanan yang prima, untuk itu membutuhkan pelayanan yang melebihi dari pelayanan pada waktu yang lalu.

Penyelenggaraan pelayanan prima kepada masyarakat, menurut aparatur pemerintah termasuk aparat kecamatan untuk memilih profesionalisme kerja yang baik sehingga akan tercapai kinerja yang baik pula, dari kinerja kecamatan yang baik maka diharapkan dapat memberikan pelayanan masyarakat yang baik pula.

Dalam rangka merespon dinamika perkembangan penyelenggaraan pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang baik, perlu memperhatikan kebutuhan dan tuntutan masyarakat dalam pelayanan maka Bupati Aceh Tamiang

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Dwiyanto, 2002, *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Galang Printika, Yogyakarta
- Asrori, B.S., 2000, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi kemampuan Untuk Melaksanakan Otonom Daerah di Yogyakarta*, Tesis MAP UGM, Yogyakarta, (Tidak Dipublikasikan).
- Bratakusumah, D.S. dan D. Solihin, 2001, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.
- Darumurti, K.D. dan Umbu Rauta, 2000, *Otonomi Daerah , Kemarin, Hari ini, dan Esok*, Kritis, Vol. XII No. 3. 1-53.
- Faustino Cardoso Gomes , 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi, Yogyakarta.
- I. Gusti Ngurah Agung, 1992, *Metode Penelitian Sosial*, Gramedia, Jakarta.
- Kaho, YR, 2001, *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kakisina, Stephen, dan Rumansara, 2000, *Otonomi Daerah, Desentralisasi Pemerintahan Sebagai Tuntutan Demokrasi Politik dan Ekonomi yang Berkeadilan*, Kritis, vol XII no 3.
- Koesoemahatmadja, 1979, *Pengantar ke arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina Cipta, Bandung.
- Koeswara, 2000, *Menyongsong Otonomi Daerah*, Analisis CSIS No. I Tahun XXIX.
- Matthew B Miles, A Michael Huberman, 1992 *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press, Jakarta.
- Masri Singarimbun, Sofian Effendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta LP3ES.
- Perda No 13 Th 2000, ttg Pembentukan Kecamatan Bansari Kabupaten Aceh Tamiang.

- Moleong, Lexy, 1990, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosda Karya, Bandung.
- Sadu Wasistiono , 2002, *Menata Ulang Kelembagaan Pemerintah Kecamatan*, Citra Pindo, Bandung.
- Slamet Soekarno, 2003, *Otonomi Daerah Di Kabupaten Kapuas*, Tesis MAP UGM (tidak dipublikasikan).
- Smith, BC, 1985, *Decentralization;The Territorial Dimension Of The State*, Gerge Allen& Unwin, London.
- Sumodiningrat, G , 1996, *Pembangunan Daerah Dan Pemberdayaan Masyarakat*, PT Biena pena pariwisata, Jakarta.
- Sugiono, 1999, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta, Bandung.
- Syamsuddin Haris, 2001, *Paradigma Baru Otonomi Daerah*, P2P-LIPI, Jakarta.
- Thoha, M, 1985, *Manajemen Pembangunan Daerah Tingkat II*, Dalam PRISMA , LP3ES, Jakarta.
- Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006.
- Utomo, Warsito, 1997, *Pemberdayaan Birokrasi*, makalah seminar FISIPOL UGM, Yogyakarta (tidak dipublikasikan).
- Wajong, J, 1975, *Administrasi Keuangan Daerah*, Ikhtiar, Jakarta.
- Widodo , Erna dan Mukhtar, 2000, *Kontruksi Ke arah Penelitian Deskriptif*, Avyrruuz, Yogyakarta.
- Zuhro, 1999, *Masa Depan Otonomi Daerah*, Jurnal Otonomi, Volume I Okotober 1999.